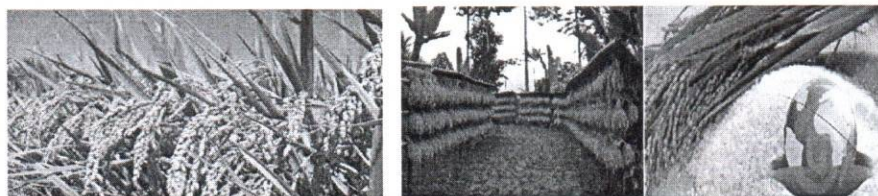


**LAPORAN  
MONITORING DAN EVALUASI  
PROGRAM DAN KEGIATAN  
Triwulan IV Tahun 2022**



Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Pendahuluan**

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yg valid tentang kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik terhadap nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan

selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) Kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penetapan kinerja tahun 2022 merupakan tahun ke-5 Renstra Dinas Ketahanan Pangan, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten memiliki fungsi Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan. Melaksanakan fungsi :

- a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi;
- b. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- c. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;
- d. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- e. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi;
- f. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Penanganan kerawanan pangan provinsi;
- h. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada

kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

- i. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota;

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 perubahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2022
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang Terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	85

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Program Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Terjaga	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Keterjangkauan / akses pangan	86,50 %
			Pemanfaatan Pangan	82,50%
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersediaan Pangan	94,50 %
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi	10 %

## C. Rencana Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan penetapan APBD Provinsi Banten Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.17.770.368.000,-.

Melalui mekanisme perubahan APBD 2022, berdasarkan PMK Nomor

140/PMK.07/2022 dan PMK Nomor 170/PMK.07/2022 Tentang Dana Insentif Daerah untuk penghargaan Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 Periode I dan Periode II kepada 125 daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Hal itu bertujuan untuk memacu Pemerintah daerah agar terus melakukan perbaikan kinerja daerah dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dimana Penggunaanya disini untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, antaranya adalah untuk perlindungan sosial seperti bansos, kemudian dukungan dunia usaha terutama untuk mikro kecil dan menengah, dan atau upaya penurunan tingkat inflasi daerah, anggaran mengalami penyesuaian untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat sehingga anggaran menjadi Rp. 49.407.075.000,- bertambah sebesar Rp. 31.636.707.000, mengalami peningkatan sebesar 178,03 %.

Tabel 2.6  
Anggaran Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

No	Program	Anggaran 2022	Perubahan Anggaran 2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	16.237.568.000	18.941.245.000
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.024.800.000	29.957.830.000
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	200.000.000	200.000.000
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	308.000.000	308.000.000

## BAB II

### CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA

#### A. Capaian Realisasi Kinerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan sasaran untuk Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah(100%);
- 2) Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (100%);
- 3) Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%);
- 4) Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%).

Program ini diimplementasikan melalui :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **139.021.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **138.846.000,00** atau **99,87%** dan capaian fisik mencapai **100%**.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **16.256.387.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **16.040.394.558,00** atau **98,67%** dan capaian fisik mencapai **100%**
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, dimana input anggaran sebesar **Rp. 20.000.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **20.000.000,00** atau **100%** dan capaian fisik mencapai **100%**
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **494.853.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **483.221.850,00** atau **97,65%** dan capaian fisik mencapai **100%**.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **1.370.554.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **1.246.100.285,00** atau **90,92%** dan capaian fisik mencapai **100%**. Kendala penyeapan anggaran ini dikernakan berlebihnya anggaran pembayaran listrik.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **528.872.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **525.233.850,00** atau **99,31%** dan capaian fisik mencapai **100%**.

7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD), dimana Input Anggaran sebesar Rp. **89.058.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **85.124.662,00** atau **95,58%** dan capaian fisik mencapai **100%**.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD), dimana Input Anggaran sebesar Rp. **42.500.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **39.598.500,00** atau **93,17%** dan capaian fisik mencapai **100%**.

**II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan indikator kinerja program yaitu : Keterjangkauan/akses pangan sebesar dengan capaian **85,58%** dan Pemanfaatan Pangan dengan capaian sebesar **83,89%**. Program ini diimplementasikan melalui :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah, Output kegiatannya Tersedianya Informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok, serta terbinanya Lembaga Distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **361.000.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **334.714.000,00** atau **92,72%** dan capaian fisik mencapai **100%**. Dengan sub kegiatan antara lain :
  - a) Penyediaan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, dengan output yaitu : 1) Pelaksanaan Rakor Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); 2) Penyusunan Dokumen NBM Provinsi Banten; dan 3) Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
  - b) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan, dengan output Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM/LUPM, Gapoktan/PUPM dan TTI/TTICD) (11 Lembaga).

**Pelaksanaan Gelar Pangan Murah**

No.	Periode	Pelaksanaan	Kab/Kota	Keterangan
1	Maret sd. November 2022	79 Kali	Kab. Tangerang	2 Permintaan Warga
			Kota Cilegon	3 Permintaan Pemkot
			Kota Serang	24 Rutin
				1 Hut Banten
				14 Permintaan Pemkot
				20 Permintaan Warga
				3 Permintaan PKK
			Kab. Serang	4 Permintaan Pem.Kab
			Kab. Lebak	1 GNPIP BI
			Kab. Pandeglang	7 Permintaan Pem.Kab
JUMLAH	79			
2	Desember 2022	13 Kali	Kota Serang	5 Rutin
				2 Permintaan Pemkot
			Kab. Pandeglang	3 Permintaan Pem.Kab
			Kota Cilegon	3 Permintaan Pemkot
JUMLAH	13			

## Fasilitasi Distribusi Pangan

No	Bulan	Jenis Komoditas	Kelompok Tani	Volume (Kg)	Besaran (Rp)	Keterangan
1	April	Beras Segar TTI	2	2.800	2.800.000	
2	Mei	Beras Segar TTI	2	4.150	4.150.000	
3	Juni	Beras Segar TTI	1	1.050	1.050.000	
4	Juli	Beras Segar TTI	2	2.500	2.500.000	
5	September	Beras Segar TTI	1	1.000	1.000.000	
6	Oktober	Beras Segar TTI	2	4.000	4.000.000	
7	November	Beras Segar TTI	4	7.500	7.500.000	
<b>Total</b>			<b>14</b>	<b>23.000 kg</b>	<b>23.000.000</b>	

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Output kegiatannya adalah Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Tersusunnya Dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **29.091.830,00** dengan realisasi sebesar Rp. **28.891.054.771,00** atau **99,31%** dan capaian fisik mencapai **100%**. Dengan Sub Kegiatan antara lain :

- a) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal dengan output Data Inventarisasi sumber daya pangan berdasarkan komoditas (1 Dokumen)
- b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan output Cadangan Pangan Pemerintah 1738 Ton.

### Rekapitulasi CPP Provinsi Banten (Bulog)

No	Tahun	(Kg) Beras				
		Stok Awal	Pengadaan	Penyaluran	Penyusutan	Stok Akhir
1	2011	-	124.000	-	25.772	98.228
2	2012	98.228	68.300	2.000	10.162	154.366
3	2013	98.228	20.000	24.385	2.511	147.470
4	2014	147.470	14.635	32.598	1.349	128.157
5	2015	128.157	90.819	81.213	8.373	129.391
6	2016	128.157	-	54.143	-	75.248
7	2017	75.248	33.000	-	-	108.248
8	2018	108.248	116.000	-	15.313	208.935
9	2019	208.935	45.000	-	4.652	249.283
10	2020	249.283	985.916	-	780	1.234.419
11	2021	1.234.419	211.100	1.137.680	6.055	301.784
12	2022	301.784	-	86.790	-	214.994
<b>Total</b>	--	--	<b>1.708.770</b>	<b>1.418.809</b>	<b>74.967</b>	<b>214.994</b>

## Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

No	URAIAN	CADANGAN PANGAN (CBP) KABUPATEN/KOTA		CADANGAN PANGAN (CPP) KABUPATEN/KOTA		CPP PROVINSI BANTEN (LDPM)		CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (LPM)		CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (LDPM)	
		(Kg beras)		(Kg beras)		(Kg) GKG		(Kg) GKG		(Kg) GKG	
		Pengadaan	Stok Akhir	Pengadaan	Stok Akhir	Pengadaan	Stok Akhir	Pengadaan	Stok Akhir	Pengadaan	Stok Akhir
I	Provinsi Banten	200.000,00	200.000,00	1.708.770,00	214.994,01						
1	Kabupaten Pandeglang	100.000,00	100.000,00	60.825,00	40.952,23	39.804,00	2.987,00	320.662,00	81.966,00	71.942,00	33.967,00
2	Kabupaten Lebak	0	0	140.000,00	112.985,36	26.536,00	0,00	108.131,00	46.891,00	65.902,00	12.402,00
3	Kabupaten Tangerang	100.000,00	100.000,00	119.054,12	118.274,60	26.536,00	0,00	13.480,00	14.130,00	72.450,00	46.436,00
4	Kabupaten Serang	100.000,00	100.000,00	519.000,00	337.050,00	39.804,00	1.198,00	273.712,00	60.265,40	82.460,00	59.910,00
5	Kota Tangerang	100.000,00	100.000,00	852.471,55	530.935,00						
6	Kota Cilegon	100.000,00	100.000,00	148.088,00	62.905,00						
7	Kota Serang	100.000,00	100.000,00	64.400,00	18.778,15			156.927,00	76.777,00		
8	Kota Tangerang Selatan	100.000,00	100.000,00	207.842,79	204.165,00						
	<b>Jumlah Kab./Kota</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.111.681,46</b>	<b>1.426.045,34</b>	<b>132.680,00</b>	<b>4.185,00</b>	<b>872.912,00</b>	<b>280.029,40</b>	<b>292.754,00</b>	<b>152.715,00</b>
	<b>Jumlah Provinsi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.708.770,00</b>	<b>214.994,01</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3.820.451,46</b>	<b>1.641.039,31</b>	<b>132.680,00</b>	<b>4.185,00</b>	<b>872.912,00</b>	<b>280.029,40</b>	<b>292.754,00</b>	<b>152.715,00</b>

## Penyaluran Bantuan Beras dalam rangka Perlindungan Sosial

Kegiatan	Jumlah (Ton)	Lokasi	KET
Pengadaan Beras untuk Pengendalian Inflasi (DID) Kinerja utk disalurkan kepada masyarakat (Perlindungan Sosial/Bantuan Sosial)	1.538,29 Ton	8 Kabupaten/Kota	DID Tahap I
Pengadaan Beras untuk Pengendalian Inflasi (DID) Kinerja utk disalurkan kepada masyarakat (Perlindungan Sosial/Bantuan Sosial)	1.056,82 Ton	8 Kabupaten/Kota	DID Tahap II
Jumlah dlm Ton	2.595,11 Ton		

## Penyaluran Bantuan Beras dalam rangka Perlindungan Sosial yang sudah tersalurkan di Tahun 2022

KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH BERAS (Kg)	KET
KAB. SERANG		12	128	10,568	
KOTA. SERANG		6	67	8,693	
KAB. LEBAK		16	195	26,279	
<b>JUMLAH</b>		<b>34</b>	<b>390</b>	<b>45,540</b>	

3. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **155.000.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **142.594.000,00** atau **92%** dan capaian fisik mencapai **100%**. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal, Output yang dihasilkan adalah Dokumen Harga Minimum Pangan Lokal (2 Dokumen).

## Perkembangan Harga Pangan Strategid Tingkat Konsumen Provinsi Banten Tahun 2022

KOMODITAS	TAHUN 2022																								TAHUN 2022												
	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGT		SEPT		OKT		NOV		DES		x'	MIN	MAKS	CV (%)									
	x'	Δ%	x'	Δ%	x'	Δ%	x'	Δ%	x'	Δ%	x'	Δ%	x'	Δ%	x'	Δ%	x'	Δ%	x'	Δ%	x'	Δ%															
Beras Premium	11,314	10,946	-3,25	11,313	3,36	3,36	11,289	-0,13	-0,13	11,289	0,00	3,23	11,279	-0,18	-0,30	11,288	-0,09	-0,27	11,280	0,11	-0,17	11,340	0,53	0,54	11,341	0,01	0,65	11,332	-0,08	0,46	11,812	1,59	1,52	11,284	10,946	11,812	1,12%
Beras Medium	9,950	9,334	-6,19	9,996	7,09	7,09	9,976	-0,26	0,18	9,922	-0,54	6,30	9,803	-1,27	-1,37	9,749	-0,76	-0,87	9,929	1,85	0,07	10,214	2,87	4,19	10,185	-0,29	4,47	10,161	-0,24	2,23	10,444	2,89	2,26	9,972	9,334	10,444	2,79%
Kedelai Biji Kering (Impor)	12,355	11,744	-4,95	13,180	12,23	12,23	14,002	6,24	13,33	13,825	-1,27	17,72	13,820	-0,05	4,86	13,933	0,82	-0,49	13,898	-0,26	0,53	14,006	0,77	1,34	14,185	1,28	1,80	14,723	3,80	5,94	16,016	1,99	7,22	13,724	11,744	16,016	6,67%
Bawang Merah	26,510	30,329	14,40	32,581	7,43	7,43	33,568	3,00	26,59	41,835	24,66	37,94	47,380	13,25	45,42	50,572	6,74	50,70	34,373	-32,03	-17,84	32,383	-5,79	-31,65	33,003	1,92	-34,74	31,977	-3,11	-6,97	32,782	2,52	1,23	35,807	26,510	50,572	20,13%
Bawang Putih Bonggol	26,810	34,921	6,35	28,249	13,35	13,35	29,761	5,35	11,84	28,130	-2,12	16,89	27,372	-8,94	-3,10	23,427	-14,41	-21,29	23,587	0,68	-19,02	23,478	-0,46	-14,23	23,559	0,35	0,56	23,458	-0,44	-0,59	24,640	5,05	4,95	25,683	23,427	29,761	9,41%
Cabai Merah Keriting	32,437	33,499	3,27	44,301	32,24	32,24	38,962	-12,29	19,81	43,533	12,28	50,25	65,479	50,07	47,81	85,261	30,21	119,39	68,536	19,32	57,30	68,283	-6,51	4,28	62,108	-23,69	-38,98	34,473	-35,84	-49,77	36,295	5,28	-46,85	50,272	32,437	85,261	34,84%
Cabai Rawit Merah	65,122	42,534	-35,20	59,543	40,89	40,89	40,946	-91,35	-25,72	46,487	13,53	9,81	81,281	74,85	36,28	84,659	4,16	106,76	69,135	-30,15	27,21	62,062	4,93	-23,66	62,102	-16,03	-38,46	37,628	-23,97	-66,54	49,458	31,79	-60,30	65,895	37,528	84,659	26,56%
Daging Sapi Murni	126,127	118,367	-6,15	130,288	10,07	10,07	139,381	6,98	10,51	143,219	2,75	21,00	139,863	-2,35	7,34	138,737	-0,08	0,25	138,267	-1,05	-4,46	137,587	-0,49	-1,62	136,774	-0,59	-1,12	136,393	-0,28	-1,16	137,757	1,00	0,12	135,313	118,367	143,219	6,17%
Daging Ayam Ras	36,859	33,582	-8,88	36,806	10,26	10,26	39,102	6,32	5,88	38,159	-2,35	14,43	38,377	0,46	4,27	37,699	-2,29	-4,17	36,471	-2,74	-4,53	36,187	-3,52	-8,31	34,460	-2,07	-8,11	34,720	0,76	-4,80	35,548	1,81	0,48	36,378	33,582	39,102	4,87%
Telur Ayam Ras	24,330	19,368	-20,39	23,547	21,57	21,57	24,521	4,13	0,79	26,616	8,56	37,42	28,304	6,34	20,20	27,381	-1,14	14,11	29,043	3,79	9,12	27,373	-6,75	-12,59	25,396	-17,22	-32,24	27,190	7,06	-8,38	29,882	10,27	9,53	26,137	19,368	29,882	11,13%
Gula Konsumsi	13,252	12,664	-4,44	13,777	8,79	8,79	13,987	1,52	5,54	13,867	-0,83	9,42	13,940	0,60	1,18	13,919	-0,15	-0,48	13,886	-0,24	0,21	13,861	-0,26	-0,64	13,775	-0,55	-1,04	13,777	0,02	-0,79	13,811	0,25	-0,29	13,708	12,664	13,987	2,76%
Minyak Goreng Kemasan Sederhana	18,310	16,289	-11,58	18,280	19,56	19,56	22,503	23,10	22,90	22,829	1,45	49,31	22,330	-2,15	22,15	18,793	-16,34	-19,63	16,929	-9,92	-35,94	16,292	-3,76	-17,04	15,996	-1,80	-14,89	15,919	-2,97	-8,10	16,002	3,11	-1,73	18,256	15,289	22,829	15,49%
Tepung Terigu (Curah)	9,997	8,488	-8,69	9,135	7,61	7,61	9,895	8,32	8,77	10,203	3,11	20,19	10,042	-1,57	9,93	10,370	3,35	4,88	10,485	1,12	2,86	10,653	1,51	6,09	10,473	-1,69	-0,91	10,397	-0,72	-6,93	10,369	-0,27	-2,67	9,969	8,488	10,653	6,91%
Minyak Goreng Curah				16,812						16,264	-3,28		15,291			12,593	-17,65	-25,15	12,615	0,18	-32,42	12,575	-0,22	-17,75	12,702	1,00	0,86	13,439	5,80	6,53	14,091	4,85	12,05	14,042	12,575	16,812	11,97%
Jagung Tl Peternak							5,998			5,892			6,197	5,18		6,077	-1,83	1,32	6,226	2,44	5,66	6,136	-1,46	-1,01	6,251	1,89	2,85	6,310	0,94	1,35	6,136	-5,892	6,310	2,28%			

## Kondisi Harga Pangan Rata-rata Tingkat Konsumen Provinsi Banten Tahun 2022



4. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, Output kegiatannya Tercapainya diversifikasi pangan masyarakat berdasarkan beragam , bergizi, seimbang dan aman (B2SA), dimana Input Anggaran sebesar Rp. **350.000.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **333.938.000,00** atau **95,41%** dan capaian fisik mencapai **100%**. Dengan Sub Kegiatan antara lain :

- a) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan output Gerakan diversifikasi pangan lokal (2 kegiatan) dan Pemanfaatan lahan perkarangan masyarakat (2 kegiatan)
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan output Edukasi dan sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA di masyarakat (2 kegiatan) dan Promosi konsumsi pangan B2SA berbasis sumberdaya local (2 kegiatan).

**Rata-Rata Kelompok Makanan Atas Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Tahun 2019-2021**

NO	KELOMPOK MAKANAN	RATA-RATA KONSUMSI KALORI PER KAPITA SEHARI MENURUT KELOMPOK MAKANAN DAN KLASIFIKASI DAERAH DI PROVINSI BANTEN (KKAL)			RATA-RATA KONSUMSI PROTEIN PER KAPITA SEHARI MENURUT KELOMPOK MAKANAN DAN KLASIFIKASI DAERAH DI PROVINSI BANTEN (GRAM)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Padi-padian	828,63	839,87	885,34	19,5	19,76	20,83
2	Umbi-umbian	32,15	36,09	42,16	0,34	0,37	0,42
3	Ikan	53,64	53,78	55,80	9,58	9,68	9,91
4	Daging	78,74	80,09	85,26	5,05	5,12	5,41
5	Telur dan susu	71,23	71,23	70,18	3,92	4,11	3,90
6	Sayur-sayuran	37,8	37,75	39,92	2,07	2,05	2,13
7	Kacang-kacangan	55,84	56,85	58,13	5,40	5,52	5,67
8	Buah-buahan	44,78	41,65	40,00	0,51	0,48	0,41
9	Minyak dan Lemak	277,35	282,48	307,54	0,09	0,09	0,08
10	Bahan Minuman	77,51	78,00	82,62	0,72	0,78	0,77
11	Bumbu-bumbuan	12,79	14,40	14,31	0,51	0,56	0,57
12	Konsumsi lainnya	65,05	63,01	65,21	1,35	1,33	1,37
13	Makanan dan Minuman Jadi	613,15	591,81	512,60	18,03	17,54	15,22
	<b>Jumlah</b>	<b>2.248,65</b>	<b>2.250,36</b>	<b>2.259,08</b>	<b>67,07</b>	<b>67,39</b>	<b>66,69</b>

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

## Pola Pangan Harapan Provinsi

NO.	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	CAPAIAN	Satuan	Sifat Data
2.2.4	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan	2020	89,78	90,13	%	Tahunan
		2021	91,14	83,99	%	Tahunan
		2022 *	92,5	84,91	%	Tahunan

No	Bidang Urusan	Sub Elemen	CAPAIAN					Satuan	Sifat Data
			2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketahanan Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	94.0	93.17	90.13	83.99	84.91	%	Tahunan
1.1		Pola Konsumsi Padi-Padian (Skor PPH Standar 25,0)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	%	Tahunan
1.2		Pola Konsumsi Umbi-Umbian (Skor PPH Standar 2,5)	1.0	1.40	1.10	0.98	1.06	%	Tahunan
1.3		Pola Konsumsi Pangan Hewani (Skor PPH Standar 24,0)	24.00	20.61	24.00	23.33	24.00	%	Tahunan
1.4		Pola Konsumsi Minyak dan Lemak (Skor PPH Standar 5,0)	5.0	5.00	5.00	5.00	5.00	%	Tahunan
1.5		Pola Konsumsi Buah/Biji Berminyak (Skor PPH Standar 1,0)	0.10	0.10	0.60	0.28	0.23	%	Tahunan
1.6		Pola Konsumsi Kacang-Kacangan (Skor PPH Standar 10,0)	7.5	10.00	6.60	5.74	5.98	%	Tahunan
1.7		Pola Konsumsi Gula (Skor PPH Standar 2,5)	1.04	1.06	2.50	1.15	1.17	%	Tahunan
1.8		Pola Konsumsi Sayur dan Buah (Skor PPH Standar 30,0)	30.00	30.00	30.00	22.52	22.47	%	Tahunan
1.9		Pola Konsumsi Lain-Lain (Skor PPH Standar 0,0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	Tahunan

Tabel 4. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	1,552	64.7	0.5	32.33	25.00	25.0	
2.	Umbi-umbian	48	2.0	0.5	1.00	1.00	2.5	
3.	Pangan Hewani	276	11.5	2.0	23.01	23.01	24.0	
4.	Minyak dan Lemak	380	15.8	0.5	7.91	5.00	5.0	
5.	Buah/biji berminyak	28	1.1	0.5	0.57	0.57	1.0	
6.	Kacang-kacangan	145	6.0	2.0	12.06	10.00	10.0	
7.	Gula	105	4.4	0.5	2.18	2.18	2.5	
8.	Sayuran dan buah	141	5.9	5.0	29.37	29.37	30.0	
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	2,674	111.4		108.45	96.14	100.0	

AKE = 2400 kkal/kap/hari

**III. Program Penanganan Kerawanan Pangan** dengan indikator kinerja program yaitu : Ketersediaan pangan dengan capaian kinerja sebesar **89,37%**, program ini diimplementasikan melalui Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi yang beroutput Terlaksananya penanganan 30 Kecamatan Daerah Rawan Pangan di 4 Kabupaten berdasarkan indikator rasio ketersediaan pangan (NCPR). Input Anggaran sebesar Rp. **200.000.000,00**, dengan realisasi sebesar Rp. **171.247.600,00** atau **85,62%** dikarenakan ada efisiensi dari kontrak pengadaan beras dan efisiensi dari honorarium. Adapun Capaian fisiknya sebesar **100%**.

Penyebab Kerentanan Pangan di 18 Kecamatan Rentan Rawan Pangan di Provinsi Banten:

1. Rasio konsumsi normatif terhadap produksi tinggi
2. Persentase kemiskinan tinggi
3. Akses air bersih kurang
4. Angka kesakitan tinggi

### Sebaran Wilayah Prioritas 1-6 Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Pandeglang	0%	0%	3%	43%	43%	11%	100%
Lebak	0%	0%	0%	18%	71%	11%	100%
Tangerang	4%	10%	31%	55%	0%	0%	100%
Serang	0%	0%	7%	21%	65%	7%	100%
Kota Tangerang	0%	0%	0%	0%	8%	92%	100%
Kota Cilegon	0%	0%	0%	0%	37%	63%	100%
Kota Serang	0%	0%	33%	0%	67%	0%	100%
Kota Tangerang Selatan	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

### Kecamatan Rentan Rawan Pangan (Prioritas 1-3) di Provinsi Banten Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas	Keterangan
1	Tangerang	Cisauk	1	Sangat Rentan
2	Tangerang	Curug	2	Rentan
3	Tangerang	Pagedangan	2	Rentan
4	Tangerang	Kosambi	2	Rentan
5	Pandeglang	Labuan	3	Agak Rentan
6	Tangerang	Cikupa	3	Agak Rentan
7	Tangerang	Kelapa Dua	3	Agak Rentan
8	Tangerang	Pasar Kemis	3	Agak Rentan
9	Tangerang	Gunung Kaler	3	Agak Rentan
10	Tangerang	Kemiri	3	Agak Rentan
11	Tangerang	Sepatan	3	Agak Rentan
12	Tangerang	Sepatan Timur	3	Agak Rentan
13	Tangerang	Pakuhaji	3	Agak Rentan
14	Tangerang	Teluknaga	3	Agak Rentan
15	Serang	Waringinkurung	3	Agak Rentan
16	Serang	Pulo Ampel	3	Agak Rentan
17	Kota Serang	Curug	3	Agak Rentan
18	Kota Serang	Kasemen	3	Agak Rentan

### Kecamatan dengan Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan Tertinggi Wilayah Kabupaten/Kota 2021

WILAYAH KABUPATEN				WILAYAH KOTA			
Peringkat	Kabupaten	Kecamatan	IKP	Peringkat	Kota	Kecamatan	IKP
1	Lebak	Panggarangan	84,54	1	Tangerang Selatan	Pondok Aren	81,33
2	Lebak	Bojongmanik	82,54	2	Tangerang	Batu Ceper	80,74
3	Pandeglang	Patia	81,81	3	Tangerang Selatan	Ciputat Timur	80,42
4	Pandeglang	Cikeusik	80,92	4	Tangerang Selatan	Serpong Utara	80,33
5	Serang	Binuang	80,03	5	Cilegon	Jombang	80,17

### Kecamatan dengan Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan Terendah Wilayah Kabupaten/Kota 2021

WILAYAH KABUPATEN				WILAYAH KOTA			
Peringkat	Kabupaten	Kecamatan	IKP	Peringkat	Kota	Kecamatan	IKP
121	Tangerang	Cisauk	30,09	34	Serang	Kasemen	31,75
120	Tangerang	Kosambi	43,9	33	Serang	Curug	36,78
119	Tangerang	Pagedangan	46,58	32	Cilegon	Pulomerak	54,50
118	Tangerang	Curug	49,28	31	Cilegon	Ciwandan	54,78
117	Tangerang	Sepatan	52,12	30	Serang	Walantaka	55,24

**IV. Program Pengawasan Keamanan Pangan** dengan indikator kinerja program yaitu : Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi dengan capaian kinerja sebesar **70,09%**, program ini diimplementasikan melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota. Input Anggaran sebesar Rp. **308.000.000,00** dengan realisasi Rp. **268.903.576,00** atau **87,31%**. Adapun realisasi fisik mencapai **100%**. Kegiatan ini memiliki beberapa sub kegiatan diantaranya :

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar dengan output Pengawasan keamanan PSAT melalui uji sampel PSAT di peredaran (30 sampel PSAT).
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output terlaksanannya Pemberian jaminan mutu dan keamanan pangan melalui sertifikasi PSAT di tingkat pelaku usaha (20 No Sertifikasi PSAT).
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output terlaksanannya Pemberian jaminan mutu dan keamanan pangan melalui Registrasi PSAT di tingkat pelaku usaha (30 No Registrasi PSAT).

NO	JUMLAH SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PSAT	TAHUN						JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Sertifikat PSAT	8	4	11	11	11	55	100
2	Jumlah Pelaku Usaha Yang Tersertifikasi	4	4	5	7	7	35	62
3	Jumlah Register PSAT	24	13	39	52	124	205	457
4	Jumlah Pelaku Usaha Yang Teregister	12	9	9	16	23	21	90
Total Sertifikat dan Register		32	17	50	63	135	260	557
Total Pelaku Usaha Yang Tersertifikasi dan Teregistrasi		16	13	14	23	30	56	152
Jumlah PSAT Yang Tersurvailen		0	0	0	21	27	39	87
Jumlah Pelaku Usaha Yang Tersurvailen		0	0	0	14	19	39	72

NO.	KABUPATEN/KOTA	SERTIFIKAT					REGISTER		JUMLAH TOTAL	
		PRIMA 3	JAMINAN MUTU HYDROPONIK	SANITASI HIJIGENE (SPPH)	HEALTH CERTIFICATE (HC)	RUMAH KEMAS	JUMLAH PSAT	JUMLAH		
1	Kabupaten Jabal	4	0	0	0	0	4	54	14	10
2	Kabupaten Pandelagang	5	0	0	0	0	5	12	12	17
3	Kabupaten Serang	7	0	0	0	0	7	9	9	17
4	Kabupaten Tangerang	4	19	9	7	3	32	188	188	225
5	Kota Cilegon	1	0	1	0	0	2	5	5	7
6	Kota Tangerang	7	11	8	0	2	28	105	105	139
7	Kota Serang	1	4	2	0	0	7	6	6	13
8	Kota Tangsel	0	7	7	0	1	15	112	112	127
JUMLAH		29	41	27	2	7	146	451	451	557

REKAPITULASI SERTIFIKAT DAN REGISTER PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN TAHUN 2016 - 2021								
NO	KABUPATEN/KOTA	SERTIFIKAT DAN REGISTER						TOTAL SERTIFIKAT DAN REGISTER
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	KAB. LEBAK	7	1	3	4	0	3	18
2	KAB. PANDEGLANG	4	2	3	5	2	1	17
3	KAB. SERANG	3	5	1	3	2	3	17
4	KAB. TANGERANG	9	5	19	9	56	127	225
5	KOTA CILEGON	0	0	6	0	0	1	7
6	KOTA TANGERANG	5	0	12	31	28	57	133
7	KOTA SERANG	1	2	0	8	0	2	13
8	KOTA TANGSEL	3	2	6	3	47	66	127
	TOTAL	32	17	50	63	135	260	557
	PERTUMBUHAN (%)		-46.88	194.12	26.00	114.29	92.59	76.02

### Rekapitulasi Sertifikat dan Register Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2022

No.	Jenis	Jumlah
1.	Sertifikasi Prima 3	1
2.	Sertifikasi Jaminan Mutu Hidroponik	0
3.	Nomor Register PSAT	66
4.	Nomor Rumah Pengemasan	2
6	Health Certificate	0
7	SPPB	7
	Jumlah	76

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp. **48.720.971.652,00** atau **98,61%** dari total pagu anggaran Rp. **49.407.075.000,00**. Realisasi tahun 2022 secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai **88,98%**. Berikut disajikan Target dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan.

### Target dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
A	BELANJA OPERASI	49.407.075.00 0	100	48.720.971.652	98,75	616.660.848
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.941.245.00 0	100	18.647.962.205	98,45	293.282.795
	1 Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.021.000	100,	136.723.500	99,87	175.000
	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.196.000	100	54.196.000	99,68	175.0000
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.636.000	100	24.636.000	100	-
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.400.000	100	5.400.000	100	-

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
	d Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.900.000	100	15.900.000	100	-
	e Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.760.000	100	3.760.000	100	-
	f Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	100	4.500.000	100	-
	g Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.196.000	100	54.196.000	100	-
	<b>2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.256.387.000</b>	<b>100</b>	<b>16.109837.058</b>	<b>99,10</b>	<b>146.549.942</b>
	a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.853.677.000	100	15.714.027.058	99,12	139.649.942
	b Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	352.710.000	100	345.810.000	98,04	6.900.000
	c Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	100	15.000.000	100	-
	d Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	100	5.000.000	100	-
	e Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	100	5.000.000	100	-
	f Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	100	25.000.000	100	-
	<b>3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	a Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	100	20.000.000	100	-
	<b>4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>494.853.000</b>	<b>100</b>	<b>483.221.850</b>	<b>97,65</b>	<b>11.631.150</b>
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000	100	10.390.000	99,01	104.000
	b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.020.000	100	92.071.000	99,98	949.000
	c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188.264.000	100	183.616.000	97,53	4.648.000
	d Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	100	49.950.000	99,90	50.000
	e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.820.000	100	11.790.000	99,75	30.000
	f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.136.000	100	130.323.850	95,73	5.812.150
	g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.113.000	100	5.075.000	99,26	38.000
	<b>5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b>	<b>1.370.554.000</b>	<b>100</b>	<b>1.246.100.285</b>	<b>90,29</b>	<b>124.453.715</b>
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	100	3.000.000	100	-
	b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.424.000	100	180.805.421	65,35	104.618.579
	c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.082.130.000	100	1.062.294.864	98,17	19.835.136

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
	<b>6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>528.872.000</b>	<b>100</b>	<b>525.233.850</b>	<b>99,31</b>	<b>3.638.150</b>
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	353.372.000	100	353.368.900	99,99	3.100
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.500.000	100	122.360.000	97,50	3.140.000
	c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	100	49.504.950	99,01	495.050
	<b>7 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>89.058.000</b>	<b>100</b>	<b>85.124.662</b>	<b>95,58</b>	<b>3.933.338</b>
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.270.000	100	4.270.000	100,00	-
	b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.357.000	100	24.969.000	98,47	388.000
	c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.045.000	100	18.765.000	93,61	1.280.000
	d Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.070.000	100	17.070.000	100	-
	e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	100	2.900.000	96,67	100.000
	f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.316.000	100	17.150.662	88,79	2.165.338
	<b>8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42.500.000</b>	<b>100</b>	<b>39.598.500</b>	<b>93,17</b>	<b>2.901.500</b>
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.500.000	100	33.443.500	99,83	56.500
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	100	6.150.000	68,39	2.845.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>29.957.830.000</b>	<b>100</b>	<b>29.702.300.771</b>	<b>99,15</b>	<b>255.529.229</b>
	<b>9 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>361.000.000</b>	<b>100</b>	<b>334.714.000</b>	<b>92,72</b>	<b>26.286.000</b>
	a Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	161.000.000	100	138.318.000	85,91	22.682.000
	b Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	200.000.000	100	196.396.000	98,20	3.604.000
	<b>10 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	<b>29.091.830.000</b>	<b>100</b>	<b>28.891.054.771</b>	<b>99,31</b>	<b>200.775.229</b>
	a Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	115.000.000	100	107.426.550	93,41	7.573.450
	b Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	28.976.830.000	100	28.783.628.221	99,33	193.201.779

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
11	<b>Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b>	<b>155.000.000</b>	<b>100</b>	<b>142.594.000</b>	<b>92,00</b>	<b>12.406.000</b>
	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	155.000.000	100	142.594.000	92,00	12.406.000
12	<b>Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100</b>	<b>333.938.000</b>	<b>95,41</b>	<b>16.062.000</b>
	a Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.000.000	100	148.982.000	99,32	1.018.000
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	200.000.000	100	184.956.000	92,48	15.044.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100</b>	<b>171.247.600</b>	<b>85,62</b>	<b>28.752.400</b>
13	<b>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100</b>	<b>171.247.600</b>	<b>85,62</b>	<b>28.752.400</b>
	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	200.000.000	100	171.247.600	85,62	28.752.400
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>308.000.000</b>	<b>100</b>	<b>268.903.576</b>	<b>87,31</b>	<b>39.096.424</b>
14	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>308.000.000</b>	<b>100</b>	<b>268.903.576</b>	<b>87,31</b>	<b>39.096.424</b>
	a Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	138.000.000	100	131.681.170	95,42	6.318.830
	b Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000	100	79.812.406	93,90	5.187.594
	c Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000	100	57.410.000	67,54	27.590.000
<b>TOTAL</b>		<b>49.407.075.000</b>	<b>100</b>	<b>48.790.414.152</b>	<b>98,75</b>	<b>616.660.848</b>

### BAB III

#### PENUTUP

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 disampaikan dalam rangka memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Untuk kedepan perlu upaya-upaya akan dilakukan dalam meningkatkan capaian-capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan diantaranya adalah :

- ✓ Peningkatan jumlah cadangan pangan daerah secara kontinyu.
  - ✓ Pemanfaatan pekarangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat.
  - ✓ Perbaiki pola konsumsi pangan untuk meningkatkan skor pola pangan harapan.
  - ✓ Peningkatan pengawasan terhadap mutu pangan segar asal tubuhan.
  - ✓ Terus menerus secara kontinyu melakukan koordinasi dengan wilayah, melibatkan semakin banyak stakeholder seperti akademisi dan praktisi pangan.
  - ✓ Melaksanakan mendampingan dan pembinaan secara terus menerus kepada pelaku usaha yang terbukti positif menyediakan bahan pangan dengan kandungan bahan berbahaya, sehingga untuk selanjutnya dapat menyediakan bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat
  - ✓ Meningkatkan sosialisasi dan pemberian informasi tentang keamanan pangan kepada para pelaku usaha dengan menambah jumlah peserta sosialisasi dan memperbanyak sasaran dari berbagai unsur masyarakat
- Kiranya Laporan ini dapat memenuhi kewajiban pengukuran kinerja dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI BANTEN



Dr. Ir. Hj. AAN MUAWANAH, MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640614 199803 2 001